

Bali dalam Dilema Pariwisata dan Budaya

I Gede Sutarya
Program Studi Industri Perjalanan Fakultas Dharma Duta
IHDN Denpasar
 sutarya@yahoo.com

Abstract

Tourism-culture relationships are expected to become mutual relations since Bali tourism was declared by the colonial government in the 1920s. In the case of Bali tourism, relationships do not always run in sync. Tourism and culture often clash, beginning with the conflict holyland of Tanah Lot Temple in 1994, the National Tourism Strategic Area (KSPN) Besakih in 2011, and the reclamation of Teluk Benoa in 2016. The roots of tourism and culture in Bali become a problem to be dissected for the purpose of revealing the root of the problem, analyzing the historical relationships at the root of the problem, and formulating solutions for the development of Balinese tourism in tune with Balinese culture. An overview of this issue can be explained that tourism and cultural conflicts arose when the planned mass tourism of 1971 began to exceed the target of foreign tourists in 1994. The root of the problem is the stampede of Balinese holiness. The stampede of the local value of Bali is causing antipathy towards the development of Bali tourism. Therefore, the development of Bali tourism must make restrictions on the visits of foreign tourists to provide an opportunity to local people to plan their own tourism Bali fair.

Keywords: Cultural Tourism, Conflict, Local Community, Fairly

Pendahuluan

Pada tahun 2016, Bali gempar dengan penolakan reklamasi Teluk Benoa, Badung, Bali. Reklamasi ini rencananya digunakan untuk pembangunan fasilitas pariwisata, seperti resort. Penolakan reklamasi ini berakar dari penolakan masyarakat Bali pada pembangunan fasilitas pariwisata baru, sebab fasilitas yang sudah ada, tidak memberikan kemakmuran maksimal kepada masyarakat Bali. Pertumbuhan fasilitas pariwisata juga menumbuhkan ketidaknyamanan baru di Bali, yaitu banyaknya pencari kerja dari luar dan berbagai tindak kriminal. Ketidaknyamanan ini menimbulkan goncangan dari sisi budaya Bali, sebab Bali sudah tidak kelihatan seperti Bali lagi dengan pertumbuhan fasilitas pariwisata.

Para penulis terkenal mencitrakan Bali sebagai sorga terakhir (Picard, 2006:23; Vickers, 2012:7). Louis Couperus (dalam Vickers, 2012:5) menulis bahwa Bali adalah sorga yang hilang. Daya tarik Bali sebagai sorga yang hilang setara dengan daya tarik Sangri La, yang juga dicari para pencari sorga di bumi (Gao dkk, 2011:197). Uriely dkk (2011:1053) menyampaikan Teori Jung yang mendasarkan citra sorga di bumi pada pencarian romantis masa lalu, pantai, pasir putih, dan matahari. Dengan menjadikan Teori Jung sebagai indikator maka sorga di Bali, sangat mengkhawatirkan, sebab Bali telah bergerak menjadi masyarakat modern dan alamnya juga telah berubah. Pertumbuhan fasilitas pariwisata menjadi kambing hitam dari perubahan budaya dan alam Bali ini.

Majalah Time pada 1 April 2011 menulis “*Holidays in Hell: Bali’s Ongoing Woes*”, yang artinya Bali telah mulai rusak dengan berbagai persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan ini ditambah dengan berbagai persoalan sosial-budaya karena perubahan demografi masyarakat Bali. Masyarakat Bali kemudian menghadapi dilema meneruskan pembangunan pariwisata atau menggantikannya dengan mencari sumber-sumber ekonomi baru. Tawaran pada penerusan pembangunan pariwisata dengan berbagai perubahan perspektif juga muncul selain tawaran-tawaran lainnya.

Pariwisata Bali ada secara resmi dengan dipenuhinya syarat-syarat suatu destinasi yaitu atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan kenyamanan (Mill dan Marrison, 2012:17) pada tahun 1924, sebab pada tahun itu sudah tersedia atraksi, fasilitas untuk menghinap, infrastruktur

yang sederhana, transportasi, dan kenyamanan yang dijamin pemerintah kolonial Belanda. Pada 1924 ini, *Official Tourist Bureau*-Kolonial Belanda mencatat kunjungan wisman ke Bali berjumlah 213 yang terus meningkat menjadi tiga ribu wisman pada 1934 (Picard, 2006:70-71). Pemerintah kolonial Belanda mengembangkan pariwisata Bali dengan konsep pelestarian budaya Bali (*Bali Seering*), tetapi Bali kemudian dilanda isu sorga bagi kaum homoseksual pada 1938. Walter Spies, pelukis ternama sempat dipenjara karena tuduhan perilaku homoseksual (Yamashita, 2003:xv).

Isu ini menjadi catatan serius bagi pengembangan pariwisata budaya di Bali, sebab ide pariwisata budaya pada awalnya muncul dari fenomena Grand Tour ke Italia pada abad ke-18 (Cooper, 2012). Pada Grand Tour ini, wisman datang ke Italia untuk mempelajari kebudayaan Italia yang menjadi ibu dari peradaban Eropa. Kunjungan ke Bali untuk budaya juga untuk mempelajari Bali masa lalu, tetapi perilaku seks menyimpang, minum-minuman keras (alkohol), dan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya lainnya juga mengikuti. Hal seperti itu juga terjadi di Italia pada abad ke-18, di mana Italia juga menyediakan bar-bar untuk minum dan sejenisnya. Dengan demikian, sejak awal, pariwisata Bali telah menimbulkan persoalan secara kultural, sehingga pariwisata dengan perilaku menyimpangnya merupakan dosa bawaan.

Dosa bawaan ini tidak bisa dihindarkan lagi ketika Bali kembali membuka pintu lebar-lebar terhadap pariwisata tahun 1970-an, sebab pada era Soekarno, pariwisata hampir tidak bergaung karena berbagai persoalan keamanan di tanah air walaupun Bali tidak memiliki daya tarik ketika era Soekarno ini. Secara formal, perencanaan pariwisata Bali kembali dilakukan pada 1971 melalui SCETO yang merencanakan untuk membangun 2.550 kamar di Nusa Dua untuk menampung 730 ribu wisman pertahun (Picard, 2006:64). Pada 1992, target SCETO ini sudah terpenuhi dengan kedatangan 735 ribu wisman (BPS, 2016) sehingga memerlukan perluasan kawasan pariwisata dengan memilih Kawasan Tanah Lot sebagai pengembangan berikutnya untuk menampung 1,5 Juta wisman pada lima tahun berikutnya. Pengembangan ini mendapatkan protes dari masyarakat Bali sebab mengganggu kawasan suci.

Pengembangan kawasan untuk menampung 1,5 Juta wisman tersebut sudah dirasakan mengganggu tempat-tempat suci sejak pengembangan di Nusa Dua, Kuta, dan menuju Tanah Lot, sebab Nusa Dua dan Kuta juga penuh dengan tempat-tempat suci. Perluasannya kemudian menuju Tanah Lot semakin membingungkan kalangan elite Bali ketika itu (tahun 1994), sebab merambah kawasan sawah dan tempat-tempat suci lainnya. Hal ini dikhawatirkan mengganggu citra Bali sebagai tempat untuk mengenang masa lalu (romantis) dan pemandangan alamnya. Kehilangan kedua hal ini mengganggu citra sorga bagi Bali, mengacu Teori Jung.

Oleh karena itu, ada kesenjangan antara harapan pembangunan pariwisata di Bali yang ingin membangun budaya dan alam Bali untuk mempertahankan citra sorga dan kenyataannya yang lepas dari budaya dan merusak alam sehingga menjauh dari citra sorga. Hal ini membangun dilema tersendiri bagi masyarakat Bali, sebab Bali sudah demikian tergantung dengan pariwisata bila ingin melakukan reposisi terhadap basis pembangunan daerahnya. Pilihannya adalah melakukan koreksi terhadap pembangunan pariwisata Bali. Koreksinya sebagian merupakan tawaran pembangunan pariwisata alternatif yang menjanjikan keberlanjutan (*sustainable tourism*). Masalahnya kemudian adalah pariwisata alternatif itu pun menjadi sulit diterapkan dalam skala yang besar.

Pembahasan

Dilema Pariwisata dan Budaya

Bali pada permulaan tumbuhnya pariwisata tahun 1920-an adalah romantisme orang-orang Eropa terhadap masa lalu mereka di era feodalisme, dengan tuan-tuan tanah dan kehidupan kerajaan. Romantisme ini menimbulkan kekaguman orang-orang Eropa terhadap Bali melalui tulisan-tulisannya tentang Bali (Vickers, 2012). Romantisme ini diisi dengan kebijakan kolonial yang disebut dengan *Bali Seering* yang berorientasi kepada pelestarian budaya Bali, tetapi pelestarian budaya ini hanya panggung depan dari pariwisata Bali. Di belakang panggung pariwisata, Bali menjadi tujuan perjalanan kalangan homoseksual, karena itu ada perbedaan antara “front region” dan “back region” (Cannel dalam Yamashita, 2003:76).

Pada awal kemerdekaan, hanya sedikit perkembangan pariwisata Bali yang dapat digali dalam hal relasi dengan budaya ini. Pada tahun 1950 – 1960 ini, semangat putra-putra daerah untuk membangun pariwisata Bali sangat tampak, seperti pembangunan Hotel Bali Segara di Sanur oleh

Ida Bagus Kompyang tahun 1956 dan pembangunan hotel di Lovina oleh AA. Panji Tisna. I Nyoman Oka yang kemudian dikenal sebagai Nang Lecir juga mulai membangun biro perjalanan pada 30 April 1956 (Hitchcock dan Putra, 2007:19). Pasca tahun 1960 ini, pembangunan pariwisata Bali mulai dibangun melalui negara dengan dibukanya Hotel Bali Beach tahun 1967 dan perencanaan Nusa Dua Resort pada tahun 1971 (Picard, 2006).

Peran negara ini perlahan bergeser ke kapitalisme dalam pariwisata Bali, ditandai dengan pembangunan pariwisata massal tahun 1971. Pembangunan resort Nusa Dua misalnya, adalah pembangunan yang dibiayai perusahaan-perusahaan asing. Negara hanya menyiapkan sumber daya manusia melalui pendirian Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) Nusa Dua pada 18 Desember 1981 yang kini menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali (STP Bali, 2017). Pada lima belas tahun kemudian (1995), pariwisata Bali mulai menggeliat dengan kedatangan wisman mencapai satu juta lebih. Pertumbuhan ini memerlukan perluasan investasi untuk menampung pertumbuhan kunjungan wisman.

Resort Nusa Dua hanya diproyeksikan untuk menampung 730 ribu wisman (Picard, 2006:64), tetapi pertumbuhan telah mencapai satu juta wisman lebih pada tahun 1995. Karena itu, perlu ada perluasan kawasan pariwisata untuk menampung pertumbuhan ini. Perluasan kawasan pariwisata ini memunculkan hubungan baru antara pariwisata dan budaya Bali, dengan dirambahnya kawasan suci sebagai kawasan pariwisata. Pembangunan Bali Nirvana Resort di Tanah Lot, Tabanan pada 1994 menjadi pemicu hubungan kurang harmonis antara pariwisata dengan budaya, yang memunculkan Bhisama Kesucian Pura Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang mengatur jarak pura dengan fasilitas pariwisata.

Peristiwa tahun 1994 ini menjadi titik pro-kontra antara pariwisata dengan budaya Bali, yang merembet kepada pembangunan di Kawasan Pura Uluwatu, Kawasan Besakih, dan kawasan-kawasan lainnya. Pada tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011, penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya mendapatkan penolakan dari masyarakat Bali. Reklamasi Teluk Benoa pada tahun 2016 juga mendapatkan penolakan dengan alasan kawasan suci. Penolakan-penolakan ini menunjukkan relasi antara pariwisata dengan budaya (juga agama) mulai kurang harmonis antara tahun 1994 – 2017 ini, di mana tahun-tahun tersebut adalah tahun pertumbuhan wisman dari satu juta menjadi empat juta wisman. Hal ini merupakan anomali dari pariwisata Bali, sebab pada peningkatan jumlah kunjungan wisman justru terjadi penolakan terhadap investasi pariwisata.

Relasi antara pariwisata dengan sosial budaya Bali ini berdasarkan jumlah kunjungan wisman dan sikap masyarakat Bali dapat digambarkan dalam Doxey Irridex (Cooper, 2012:103) dengan level-level relasi yaitu *euphoria*, *apathy*, *irritation*, *antagonism* dan *final*. Pada level *euphoria*, masyarakat antusias menyambut pariwisata, karena ada harapan-harapan kemajuan ekonomi dan budaya. Pada level *apathy*, masyarakat mulai terlibat dalam pariwisata dan merasakan keuntungan pariwisata dari sisi ekonomi dan penghargaan terhadap budaya Bali. Dalam level *irritation*, pariwisata berkembang pesat sehingga masyarakat lokal memerlukan tambahan investasi dan tenaga kerja dari luar sehingga keuntungan ekonomi terbagi dan budaya mulai mengalami gangguan. Setelah level ini, muncul level *antagonism* di mana masyarakat lokal mulai menentang pertumbuhan pariwisata karena pariwisata ternyata tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan, menghancurkan lingkungan, dan merusak budaya. Pertentangan ini menimbulkan masa puncak yang disebut level *final* di mana masyarakat mulai melupakan pariwisata sebagai sarana untuk kemajuan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan kunjungan wisman dan investasi di Bali, level-level ini dapat digambarkan dalam relasi pariwisata dengan sosial budaya Bali. Gambaran ini merupakan perbandingan antara peningkatan jumlah wisman dan sikap masyarakat Bali. Gambaran selengkapnya diuraikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Doxey Irridex dalam Relasi Pariwisata dengan Sosial Budaya Bali

No	Level	Periode	Kunjungan Wisman	Keterangan
1.	Euphoria	1981 - 1986	100.000 - 200.000	Pariwisata adalah harapan
2.	Apathy	1986 - 1991	250.000 – 500.000	Keuntungan bagi masyarakat lokal mulai kelihatan
3.	Irritation	1991 - 1996	500.000 – 1.000.000	Perluasan kawasan pariwisata
4.	Antagonism	1996 - 2001	1.000.000 – 1.500.000	Pertentangan antara masyarakat Bali dengan investor pariwisata mulai BNR tahun 1994
5.	Final	2001 -	1.500.000 – 4.000.000	Memudarnya harapan kepada pariwisata

Dengan Doxey Irridex ini terlihat bahwa konflik antara pariwisata dengan masyarakat lokal di Bali terjadi ketika jumlah kunjungan wisman mulai menapaki satu juta wisman. Jumlah kunjungan wisman yang mencapai satu juta ini memerlukan perluasan investasi. Perluasan investasi telah diprediksi pemerintah provinsi Bali, sehingga keluar SK Gubernur tahun 1988 yang menetapkan 15 kawasan pariwisata. Penetapan 15 kawasan pariwisata ini dikaji kelayakan oleh *Comprehensive Tourism Development Plan for Bali, Consultant Hassal and Assosiate Scott and Furphy* tahun 1990 (Gelebet, 1994).

Setelah dikaji kelayakannya tahun 1990, pengembangan ini justru mendapatkan perlawanan dari masyarakat Bali. Elite-elite masyarakat Bali ketika itu (1994) sudah tidak menginginkan lagi model pembangunan pariwisata seperti Nusa Dua. Berdasarkan berbagai tulisan di media massa ketika itu (1994-2000), ide-ide yang mulai muncul ada pariwisata kesehatan dan spiritual, seperti yang ditulis praktisi pariwisata, Ketut Utama (1994). Pada tulisannya, Utama menyatakan Bali telah menjadi tujuan dari wisman spiritual ketika itu, selain Nepal, Thailand dan negara-negara lainnya.

Ide Utama (1994) ini rupanya jawaban dari kegelisahan intelektual Bali ketika itu. Gelebet (1994) gelisah dengan tata ruang Bali, Adnyana Manuaba (1993) gelisah dengan dampak lingkungan, dan Ngurah Bagus (1994) gelisah dengan tanah Bali yang mulai beralih hak. Karena itu, kegelisahan elite-elite Bali pada level *irritation* ini adalah dampak budaya dan lingkungan melalui isu-isu tata ruang, tanah dan lingkungan. Isu tentang tanah adalah isu sentral yang dikemukakan Ngurah Bagus, sebab lepasnya tanah Bali adalah pencerabutan orang Bali dari akar budayanya.

Kegelisahan ini terus muncul sampai tahun 2000-an, tetapi pembangunan pariwisata Bali terus berlangsung. Pembangunan ini mulai berhati-hati dengan isu “kawasan suci”, sebab cepat memancing tanggapan masyarakat Bali. Para aktivis lingkungan pun kerap melakukan kritik terhadap pembangunan Bali dengan isu “kawasan suci”, sebab perlindungan kawasan alam melalui kawasan suci lebih efektif menarik simpati masyarakat Bali. Isu kawasan suci juga mengemuka pada penolakan reklamasi Teluk Benoa, Denpasar pada 2016 ini.

Masa Depan Pariwisata Bali

Indonesia menargetkan kunjungan 20 juta wisman tahun 2020, sedangkan Bali ditargetkan bisa memberikan andil 10 juta wisman tahun 2020. Karena itu, Bali memasang target delapan juta wisman pada tahun 2019. Target ini dinyatakan Cokorda Sukawati (Cok Ace) pada Musda PHRI Bali tahun 2015 (Venuemagz, 2015). Target ini berada pada posisi *final level* di mana masyarakat Bali sudah tidak terlalu berharap dari pariwisata, sebab penghasilan dari pariwisata secara perseorangan terus menurun. Penurunan ini terjadi karena persaingan usaha dan tenaga kerja di Bali. Karena itu, peningkatan jumlah kunjungan wisman yang mencapai empat juta wisman tahun 2016, tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat Bali. Pada saat itu (2016), masyarakat Bali justru ramai-ramai membicarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa yang akan digunakan sebagai tempat pembangunan fasilitas pariwisata.

Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pariwisata di Bali, harus diberikan jeda dahulu untuk menunggu perkembangan usaha-usaha rakyat Bali. Investasi yang terus berkembang, ternyata menimbulkan persaingan tidak sehat di Bali, dengan fenomena banting harga kamar hotel berbintang yang berpengaruh terhadap hotel-hotel melati. Banting harga hotel ini juga memerlukan penghematan pada pengelolaan hotel. Salah satu yang bisa dihemat adalah ongkos tenaga kerja, sehingga penghasilan karyawan-karyawan hotel menurun. Hal ini menimbulkan pengurangan pendapatan perkapita pada sektor pariwisata, meskipun kunjungan wisman terus meningkat.

Dengan mengurangi laju investasi ini, pemerintah memberikan peluang kepada usaha-usaha rakyat untuk terus berkembang. Usaha-usaha rakyat Bali yang seharusnya diberikan kesempatan adalah pariwisata spiritual, sebab potensi manusia Bali pada sektor tersebut cukup besar. Lokasi pariwisata spiritual pun tidak akan berbenturan dengan isu-isu kawasan suci, sebab kawasan suci bisa digunakan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan spiritual. Kawasan suci bisa menjadi salah satu tempat fasilitas dan daya tarik dari pariwisata spiritual di Bali.

Perkembangan pariwisata spiritual di seluruh dunia, telah semakin baik. India, Indian-Amerika, dan Afrika telah menjadi tujuan-tujuan pariwisata spiritual. Tujuan-tujuan pariwisata spiritual ini telah bergeser dari tujuan spiritual ke kesehatan holistik yang juga disebut dengan *wellness*. Karena itu, aset-aset spiritual dunia telah mulai digunakan untuk pengembangan *wellness*. Negara-negara di Asia Tenggara mengembangkan sekitar 20 persen aset spiritualnya untuk *wellness* (Sutarya, 2016:199).

Bali sejak tahun 1994, mulai menutup pintu investasi pariwisata untuk kawasan suci yang merupakan aset spiritual. Hal ini menimbulkan ketersesakan ruang di kawasan-kawasan padat seperti Kuta, Nusa Dua dan Ubud. Karena itu, untuk mengurangi kepadatan ini, perlu dibangun diversifikasi investasi pariwisata untuk spiritual. Kawasan suci bisa terbuka untuk investasi pariwisata spiritual ini sepanjang pro masyarakat lokal. Berdasarkan konsep Tri Mandala dalam manajemen ruang di Bali, yang terdiri dari Utama Mandala, Madya Mandala dan Nista Mandala maka 30 persen dari ruang-ruang di kawasan suci bisa digunakan untuk pengembangan investasi pariwisata spiritual, misalnya pembangunan ashram internasional, pusat-pusat latihan yoga dan meditasi di Nista Mandala.

Pengembangan aset spiritual untuk pariwisata spiritual akan membangun relasi baru antara pariwisata dengan budaya, yaitu bahwa budaya dan pariwisata akan memiliki relasi untuk saling mengembangkan. Hal ini akan membelokkan *final level* relasi pariwisata dengan masyarakat Bali menuju *euphoria level* baru, yaitu membangun pariwisata sebagai jalan untuk penyebarluasan budaya Bali ke seluruh dunia. Karena itu, pariwisata tidak hanya akan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Bali, tetapi akan dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri masyarakat Bali yang memiliki talenta budaya spiritual yang diakui dunia.

Dengan demikian, pariwisata akan meningkat posisinya dalam masyarakat Bali dari untuk memenuhi kebutuhan dasar menuju pemenuhan kebutuhan sosialisasi diri, penghargaan, dan aktualisasi diri. Hal ini akan mendorong pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin masyarakat Bali. Pemenuhan kebutuhan manusia Bali yang holistik ini akan melanggengkan hubungan yang harmonis antara pariwisata dengan masyarakat Bali melalui pembangunan *euphoria level* baru melalui peremajaan kreativitas.

Penutup

Relasi pariwisata dengan budaya Bali telah mencapai final level sejak tahun 2001, sehingga harapan dari pembangunan pariwisata mulai memudar. Hal ditandai dengan penolakan masyarakat Bali terhadap investasi besar di sektor pariwisata. Final level ini dapat diremajakan kembali ke *euphoria level* yang baru apabila Bali mulai mengembangkan pariwisata spiritual, sebab pariwisata spiritual ini akan membangun kembali hubungan yang saling menguntungkan antara pariwisata dengan masyarakat Bali. Dengan pembangunan pariwisata spiritual ini maka sekitar 30 persen dari kawasan suci di Bali bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas untuk pariwisata spiritual, seperti ashram internasional, pusat latihan yoga, dan pusat latihan meditasi.

Pengembangan pariwisata spiritual ini juga akan menempatkan pariwisata sebagai media untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri masyarakat Bali melalui penyebaran talenta-talenta budaya masyarakat Bali ke seluruh dunia. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya akan menjadi media

untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pemenuhan kebutuhan terhadap sosialisasi diri, penghargaan, dan aktualisasi diri. Perkembangan ini akan menjadikan ukuran penerimaan pariwisata pada masyarakat Bali, tidak lagi hanya kuantitatif berupa pendapatan perkapita, tetapi juga bersifat kualitatif berupa kepuasan diri.

Daftar Pustaka

- Bali Post. 1994. *Konsepsi Tanah sebagai Tata Ruang Orang Bali*. (wawancara). Bali Post, 12 Januari 1994.
- BPS Bali. 2017. Publikasi Statistik Provinsi Bali. <https://bali.bps.go.id/index.php/publikasi>. Dikutip pada 24 Maret 2017 pada pukul 11.09 Wita.
- Cooper, Chris. 2012. *Essential of Tourism*. England: Pearson.
- Gao, Bo Wendy dkk. 2011. Phantasmal Destination: A Post Modernist Perspective. *Annal Tourism Research*. 39 (1): 197-220.
- Gelebet, I Nyoman. 1994. Kawasan Tanah Lot bukan untuk BNR. Denpasar: Bali Post (publikasi 17 Januari 1994).
- Hitchcock, Michael dan I Nyoman Darma Putra. 2007. *Tourism, Development and Terrorism in Bali*. England: ASHGATE.
- Manuaba, A. 1993. *Lapangan Golf Si Maniak Air dan Pembawa Bencana Lingkungan*. Denpasar: Bali Post (publikasi 4 Desember 1993).
- Mill, Christine Robert dan M. Alastair Morrison. 2012. *The Tourism System*. USA: Kendall Hunt.
- Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya, Budaya Pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- STP Bali. 2017. Sejarah STP Nusa Dua Bali. stpbali.ac.id/index.../Sejarah.html. Dikutip pada 24 Maret 2017 pukul 10:23 Wita.
- Sutama, Ketut. 1994. Pariwisata Kesehatan dan Spiritual. Denpasar: Bali Post (publikasi 24 Januari 1994).
- Uriely, Natan dkk. 2011. Pscoanalytic Sociology of Deviant Tourist Behavior. *Annal Tourism Journal Research*. 38 (3): 1051-1069
- Venuemagz. 2015. *Musda PHRI Bali: Target 8 Juta Wisman ke Bali*. www.venuemagz.com/.../musda-phri-bali. Dikutip pada 30 Maret 2017 pukul 11.14 Wita.
- Vickers, Andrian. 2012. *Bali Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Yamasihita, Shinji. 2003. *Bali and Beyond Explorations in the Anthropology of Tourism*. New York: Oxford.